

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tanjungpinang

Jl.Dr.Sahardjo SH. No.1 Kp.Banjar Lama Km.18 Gunung Kijang-Bintan 29151 085272367979

www.lapastanjungpinang.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KEPULAUAN RIAU / Lembaga

Cuti Menjelang Behas Tindak Pidana Tertentu

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tanjungpinang

No. SK :

Persyaratan

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tanjungpinang

Jl.Dr.Sahardjo SH. No.1 Kp.Banjar Lama Km.18 Gunung Kijang-Bintan 29151 085272367979

www.lapastanjungpinang.kemenumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KEPULAUAN RIAU / Lembaga

1. Telah menjalani masa pidana paling sedikit 2/3 (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana 1.Surat keterangan tidak terdaftar dalam red notice dan jaringan kejahatan transnasional terorganisasi Rp. 0 Surat Keputusan Menteri tentang Cuti Bebas kepada Narapidana 995tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan;
2. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir, dihitung dari tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana
3. Lamanya Cuti Menjelang Bebas sebesar Remisi terakhir, paling lama 3 (tiga) bulan;
4. Telah mendapatkan pertimbangan dari Direktur Jenderal;
5. Dibuktikan dengan melampirkan kelengkapan dokumen: a.Salinan putusan hakim dan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan b.Laporan perkembangan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang dibuat oleh Wali Pemasyarakatan atau hasil assessment resiko dan assesment kebutuhan yang dilakukan oleh asesor; c.laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing lainnya dari Sekretariat NCB-Interpol Indonesia. 2.Tim Pengamat Pemasyarakatan melaksanakan sidang dan hasilnya disampaikan kepada Kepala Lapas; 3.Kepala Lapas mengusulkan pemberian CMB kepada Kanwil; 4.Kanwil melaksanakan sidang TPP dan hasilnya disampaikan kepadaDirektur Jenderal Pemasyarakatan; 5.Di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, TPP Pusat melaksanakan sidang TPP; 6.Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri menetapkan pemberian Cuti Menjelang Bebas berdasarkan rekomendasi sidang TPP Pusat; 7.Lapas menerima dan melakukan pengecekan SK CMB; 8.Lapas melaksanakan SK pemberian CMB 996Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Basas; d.surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Cuti Menjelang Bebas terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang bersangkutan; e.salinan register F dari Kepala Lapas; f.salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas; g.Surat pernyataan dari Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; h.Surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan bahwa: 1.Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan 997melanggar hukum; dan 2.Membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan selama mengikuti program Cuti Menjelang Bebas.
6. Bagi WNA harus melengkapai dokumen: a.Surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan dari: 1.Kedutaan besar/konsulat negara; dan 2.Keluarga, orang, atau korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan selama berada di wilayah Indonesia. b.Surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan 998dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal; dan c.Surat keterangan tidak terdaftar dalam red notice dan jaringan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya dari Sekretariat NCB-Interpol

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tanjungpinang

Jl.Dr.Sahardjo SH. No.1 Kp.Banjar Lama Km.18 Gunung Kijang-Bintan 29151 085272367979

www.lapastanjungpinang.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KEPULAUAN RIAU / Lembaga



Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pemasyarakatan Kelas IIA Tanjungpinang

1. Surat keterangan tidak terdaftar dalam red notice dan jaringan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya dari Sekretariat NCB-Interpol Indonesia
2. Tim Pengamat Pemasyarakatan melaksanakan sidang dan hasilnya disampaikan kepada Kepala Lapas;
3. Kepala Lapas mengusulkan pemberian CMB kepada Kanwil
4. Kanwil melaksanakan sidang TPP dan hasilnya disampaikan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan;
5. Di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, TPP Pusat melaksanakan sidang TPP
6. Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri menetapkan pemberian Cuti Menjelang Bebas berdasarkan rekomendasi sidang TPP Pusa
7. Lapas menerima dan melakukan pengecekan SK CMB
8. Lapas melaksanakan SK pemberian CMB

Waktu Penyelesaian

1 Bulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Cuti Bebas Kepada Narapidana

Pengaduan Layanan

Petugas Penanganan Pengaduan [0822-8888-4174](tel:0822-8888-4174)